

PERMASALAHAN PENDIDIKAN MENYONGSONG PASAR BEBAS

**Oleh :
Husaini Usman**

Abstrak

Era pasar bebas merupakan peluang dan tantangan bagi lulusan pendidikan yang berkualitas untuk bersaing sekaligus bekerjasama dengan bangsa-bangsa Asean lainnya dalam merebutkan peluang pasar. Langkah strategis untuk mengembangkan kualitas SDM ialah pendidikan. Dalam melaksanakan langkah strategis tersebut, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah seperti: kompetisi, kooperasi, adaptasi, partisipasi, negosiasi, komunikasi, inovasi, dan jati diri.

Penyebab timbulnya masalah-masalah tersebut di antaranya adalah: sentralisasi birokrasi, meremehkan kualitas, monopoli, oligopoli, korupsi, pungli, mengejar target kuantitas, belum dapat bekerja secara tim, belum ada peraturan perundang-undangan tentang kerjasama pengusaha dengan pengelola sekolah, belenggu aturan-aturan praktis, rendahnya kualitas SDM, lemahnya daya bayar masyarakat, rendahnya keterampilan berkomunikasi, tertutupnya budaya dialogis ilmiah, terbiasa menunggu perintah dari atas, dan dampak negatif globalisasi.

Alternatif pemecahan masalah antara lain: mengadakan Undang-Undang anti monopoli, menggalakkan budaya kualitas, menciptakan pengelola pendidikan dan lulusan-lulusan yang terampil berkooperasi, mengembangkan lebih banyak pendidikan bidang eksakta, meningkatkan kemitraan dengan swasta, meningkatkan penelitian mengembangkan pendidikan profesional, membudayakan akreditasi pendidikan, menggalakkan pendidikan kewiraswastaan, mengadakan deregulasi pendidikan, membekali teori dan praktek negosiasi, mengikuti kursus bahasa, membudayakan dialog ilmiah dan mitra bestari, melibatkan pengelola pendidikan dalam perencanaan pendidikan, meningkatkan dukungan sumber daya pendidikan, melestarikan budaya bangsa, dan memperkuat iman dan taqwa.

Pendahuluan

Artikel ini tidak membahas masalah-masalah umum pendidikan yang sudah kuno, yang sudah sering dibicarakan dan ditulis orang seperti masalah: kualitas, kuantitas, efektivitas, dan produktivitas tetapi membahas masalah-masalah pendidikan yang diramalkan akan muncul menyongsong pasar bebas *AFTA* (A tahun 2003).

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) khususnya di bidang komunikasi, informasi, dan transportasi menjadikan dunia semakin sempit dan transparan. Sementara itu, hubungan perdagangan antarbangsa juga semakin terbuka menuju ke arah pasar bebas. Era pasar bebas akan melahirkan paradikma baru di bidang ekonomi, politik,

sosial, budaya, dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Paradigma ekonomi bergeser dari sistem kapitalis menuju sistem *multi-national corporation* yang akhirnya melahirkan gaya hidup konsumerisme global.

Pola produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa tidak lagi bersifat nasional tetapi akan menembus batas ruang dan waktu menjadi kesatuan produksi, distribusi, dan pemasaran dunia. Akibatnya, pasar kerja pun turut dipasarbepaskan. Sejalan dengan pasar kerja yang bersifat global, standar kualifikasi profesi tenaga kerja juga berkembang ke arah kualifikasi internasional.

Langkah strategis untuk mengembangkan SDM berkualitas global adalah melalui pendidikan. Dalam rangka mewujudkan langkah strategis tersebut akan dijumpai sejumlah masalah yang selanjutnya menjadi fokus utama pembahasan.

Identifikasi masalah pendidikan menyongsong pasar bebas penting untuk dibahas pada kesempatan ini karena dengan mengetahui sejumlah masalah, maka pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan dapat memilah dan memilih masalah yang paling mendesak dan penting untuk segera dipecahkan.

Landasan Teoritis

Masyarakat kita mengalami proses transformasi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Pada tahun 1996 ini, Indonesia secara keseluruhan dinilai tertinggal jauh dengan 48 negara yang turut bersaing di kancah internasional. Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 48 negara dalam hal kualitas SDM-nya, menduduki peringkat 42 dalam bidang kemampuan manajemen, dan menduduki peringkat 40 di bidang Ipteks (Anonim, 1996a: 33) Seperti telah dinyatakan (Tilaar, 1996) bahwa era pasar bebas menimbulkan masalah-masalah pendidikan antara lain: bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir analitik saintifik?, dan bagaimana menciptakan sikap inovatif kreatif? Sementara itu Unesco (1995) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan adalah: sejauh mana peran lembaga pendidikan sebagai pusat pengembang ipteks?, bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang profesional?, bagaimana menciptakan lembaga pendidikan sebagai tempat proses belajar mengajar yang kondusif?, dan bagaimana melakukan kerjasama internasional? Sehubungan dengan permasalahan pendidikan diidentifikasi sebagai berikut: (1) bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dasar?; (2) bagaimana melakukan komunikasi yang efektif?; (3) bagaimana mengembangkan etik dan agama?; (4) bagaimana mendapatkan otonomi pendidikan yang memenuhi tuntutan regionalisme?; (5) bagaimana menciptakan desentralisasi

pendidikan?; dan (6) bagaimana struktur pendidikan dan pelatihan? (Anonim, 1993b:25)

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi pendidikan menyongsong pasar bebas nanti ditinjau dari pendekatan manajemen pendidikan adalah masih rendahnya: kompetisi, kooperasi, adaptasi, partisipasi, negosiasi, komunikasi, inovasi, dan jati diri (identity).

Pembahasan dan Pemecahan Masalah

1. Kompetisi

Dunia pendidikan di Indonesia dihadapkan pada empat tantangan yaitu lokal, regional, nasional, dan internasional. Dalam kaitannya dengan permasalahan pendidikan menyongsong pasar bebas, maka tantangan pendidikan dalam skala internasional menurut Unesco (1995) adalah: kualitas, relevansi, dan internasionalisasi pendidikan. Masalah kualitas dan relevansi adalah masalah klasik yang sudah banyak dibahas, sedangkan masalah internasionalisasi pendidikan baru mulai terasa dampaknya akhir-akhir ini dengan semakin aktifnya para agen perguruan tinggi luar negeri menawarkan program-programnya secara profesional dan proporsional. Keadaan ini dapat memacu liberalisasi pendidikan. Sebagai contoh, di antara negara Asia Tenggara sudah ada yang bekerjasama dengan pihak luar negeri untuk menyelenggarakan pendidikan misalnya SMA Global di Jakarta dan Bekasi. Jika pendidikan kita tidak mampu berkompetisi, maka pendidikan kita di pasar bebas nanti akan mulai dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Rendahnya daya kompetisi bangsa kita (nomor 41 dari 48 negara) antara lain disebabkan rendahnya kemampuan Ipteks dan bisnis kita, sedangkan kedua kemampuan ini sebenarnya dapat dikembangkan melalui pendidikan. Di samping itu, disebabkan pula oleh: birokrasi pemerintahan yang masih buruk (peringkat 40 dari 48 negara), dominannya iklim monopoli dan oligopoli, banyaknya korupsi dan kolusi serta pungli, belum adanya undang-undang yang mengatur tentang kompetisi, besarnya utang luar negeri, masih belum baiknya infrastruktur, tingginya tingkat urbanisasi, dan kuatnya sentralisasi administrasi pemerintahan. Seperti telah dinyatakan Koentjoroningrat (1995: 45) bahwa rendahnya kemampuan berkompetisi bangsa kita juga disebabkan bangsa kita cenderung meremehkan kualitas demi mengejar target kuantitas.

Antisipasinya antara lain perlu adanya Undang-undang Anti Monopoli, dan membudayakan kualitas yang tinggi di segala bidang.

2. Kooperasi

Kooperasi di sini dalam makna bekerjasama dalam suatu tim untuk

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bangsa Indonesia tidak akan bisa menang berkompetisi dengan bangsa lainnya karena kita baru bisa bekerja dalam kelompok, belum dalam suatu tim. Kelompok merupakan kumpulan orang-orang sejenis misalnya para dosen administrasi dan supervisi pendidikan yang berserikat menjadi satu. Perbedaan sedapat mungkin dihindari, sedangkan keharmonisan dan kestabilan lebih diutamakan. Perbedaan bukan merupakan asas kelompok. Dalam kelompok kurang dirangsang munculnya kompetisi karena dapat menimbulkan kegoncangan yang berarti dapat mengganggu kestabilan. Kalau terjadi perbedaan, biasanya tidak muncul ke permukaan. Jika muncul, maka orang yang pencetus perbedaan itu dianggap sebagai lawan yang kemudian dikeluarkan atau mengeluarkan diri dari kelompoknya. Sebaliknya, tim merupakan kumpulan orang-orang yang berbeda jenisnya misalnya para ahli pendidikan, para pengusaha, para birokrat, para teknokrat yang saling melengkapi secara alami bagi inisiatif dan hasil kerja individu untuk meningkatkan komitmennya dalam mencapai tujuan. Perbedaan yang datang dari berbagai potensi sebagai awal pembentukan tim, tetapi unsur-unsur perbedaan itu bisa melebur untuk menciptakan produk kerja yang selaras dalam mencapai tujuan bersama. Perbedaan dan konflik yang terjadi dalam tim justru disadari oleh anggotanya sebagai kelemahannya sendiri dan menghargai kelebihan anggota lainnya. Kinerja tim yang demikian akan melahirkan hasil kerja yang kompetitif.

Data lapangan menunjukkan bahwa kondisi pengajaran di Sekolah Menengah Kejuruan dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda masih kurang memuaskan segala pihak yang terkait Djatmiko (1996:15). Hal ini disebabkan karena seperti yang dinyatakan Sunaryo, dkk., (1996:25) dan Suyanto, dkk. (1995: 198) bahwa tanggapan pengusaha dalam rangka *link and match* ternyata cenderung kurang kooperasi dengan pengelola sekolah. Jika para pengusaha melalui himbauan, pendekatan formal dan personal masih juga kurang peduli, maka pemerintah perlu mengadakan tindakan politik agar perusahaan yang sudah mapan wajib berkooperasi dengan pengelola sekolah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan penghargaan dan sanksi yang tegas. Seperti yang dinyatakan Mutaqin, dkk. (1995: 244) bahwa pengusaha dan pengelola pendidikan mengharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kooperasi tersebut. Hasil penelitian Mutaqin, dkk. (1995: 244) menyimpulkan bahwa 66,42% industri di DIY menghendaki adanya peraturan kooperasi tersebut. Pemerintah juga hendaknya memberikan keringanan fiskal misalnya membebaskan pajak bagi para pengusaha yang telah berkooperasi dengan pengelola sekolah. Para pengusaha terlibat dalam pendirian sekolah yang mendukung proses magang, dan dana riset. Dengan demikian terjadi profesionalisasi dan spesialisasi lulusan sekolah yang sesuai

dengan kualifikasi dunia kerja untuk siap berkompetisi di arena pasar bebas nanti. Berkenaan dengan kooperasi pengelola sekolah dengan para pengusaha Sofyan, dkk. (1995: 201) menyatakan bahwa secara formal belum ada kooperasi antara pihak sekolah dengan industri.

Masalah rendahnya kooperasi tampak dari adanya gejala bahwa masing-masing yang terlibat dengan pendidikan masih berjalan sendiri-sendiri dengan tujuannya sendiri-sendiri pula. Jika ditinjau dari sudut sejarahnya, maka nenek moyang kita sejak dahulu kala telah mewariskan peguyuban, kolektif, kekeluargaan, dan gotong-royong. Namun, budaya tersebut ternyata cenderung ke arah kelompok ketimbang dalam tim. Contohnya, kita lebih senang bekerja bersama-sama, beramai-ramai, berkumpul-kumpul, rapat-rapat untuk bermusyawarah yang semuanya bermuara guna menjaga keharmonisan dan kestabilan. Perkelahian massal merupakan contoh kerja kelompok. Kelompok SMK berkelahi dengan kelompok SMU, kelompok Megawati berkelahi dengan kelompok Suryadi, kelompok Dayak Kalbar berkelahi dengan kelompok pendatang.

Bangsa kita belum pandai bekerja secara tim. Olah raga beregu merupakan tim bukan kelompok. Olah raga yang membutuhkan kooperasi seperti sepak bola, bola basket, bola volly, polo air, ternyata bangsa kita selalu kalah di pertandingan internasional. Tetapi sebaliknya, olah raga yang sifatnya individual, bangsa kita cenderung dapat memenangkannya. Contohnya: tunggal putra dan putri untuk bulutangkis (Rudi Hartono, Icuk, Joko Supriyanto, Susi Susanti), tunggal putri untuk tenis (Yayuk Basuki), lari (Mardi), tinju (Ellyas Pical).

Birokrat-birokrat kita yang memimpin lembaganya merupakan produk dunia pendidikan ternyata masih ada yang belum mampu berkooperasi. Buktinya, jalan yang telah diselesaikan Departemen Pekerjaan Umum dibongkar kembali untuk memasang kabel oleh Telkom. Jalan itu kemudian diperbaiki dan dibongkar lagi untuk memasang pipa air minum oleh PDAM. Setelah jalan diperbaiki lagi selanjutnya dibongkar kembali untuk memasang pembuangan air kotor oleh Dinas Kebesihan Kota. Setelah jalan diperbaiki lagi, dibongkar pula untuk memasang kabel oleh PLN.

Rendahnya kooperasi di bidang pendidikan tampak dari tidak menyatunya ilmu-ilmu yang diberikan kepada peserta didiknya. Ada kesan bahwa masing-masing ilmu berdiri sendiri. Tenaga pengajar cenderung memberikan ilmunya sendiri-sendiri tanpa mau dan mampu mengaitkannya dengan ilmu-ilmu lainnya yang relevan, terlebih-lebih dalam fungsinya bagi kehidupan dan penghidupan peserta didik sehari-hari sehingga nilai ilmu menjadi gersang, membosankan, dan kurang bermakna bagi peserta didik. Pelaksanaan mengajar dalam bentuk tim belum berjalan secara efektif. Kasus yang terjadi di salah satu program studi menunjukkan bahwa praktek di bengkel dan laboratorium yang seharusnya dilaksanakan secara tim, dalam

kenyataannya cenderung diajar sendiri secara bergantian oleh dosen-dosennya. Jadi, kooperasi belum berjalan seperti yang diharapkan.

Dalam menyongsong pasar bebas nanti, dunia pendidikan harus mampu menciptakan lulusan-lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berkooperasi. Dunia kerja menuntut kooperasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dunia kerja dalam meningkatkan kompetisinya telah menerapkan konsep *Inspection* (1920-an), *Total Quality Control (TQC)* (1940-an), *Quality Assurance (QA)* (1940-an), *Total Quality Management (TQM)* (1950-an), *Total Control System (TQS)* (1978), dan *International Standard Organization 9000 (ISO-9000)* (1986). Kesemua konsep ini akan berjalan manakala didukung oleh kooperasi yang baik. Untuk memenangkan kompetisi di pasar bebas, maka negara-negara senasib telah melakukan kooperasi dalam bentuk *Asean Free Trade Agreement (AFTA)* dengan *Program Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*, *European Free Trade Agreement (EFTA)*, *North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA)*, *Latin American Free Trade Association (LAFTA)*, *Trans Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA)*, *Asean Pasific Economic Cooperation (APEC)*, *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, *East Asia Economic Caucus (EAEC)*, *African Financial Community (AFC)*, *Central American Economy Union (CAEU)*, *Caribbean Community (Caricom)*, *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* dalam putaran Uruguay yang sekarang berkembang menjadi *World Trade Organization (WTO)*. Jadi, negara-negara saling berkooperasi untuk sama-sama dalam berkompetisi dengan negara-negara lainnya sehingga kompetisi dan kooperasi bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, tetapi dua hal yang saling melengkapi.

3. Adaptasi

Adaptasi pendidikan kita ternyata masih rendah seperti yang dinyatakan Sunyoto, dkk. (1994: 253, Djoemadi dan Rahdiyanta, (1994: 239) serta Ngadiyono (1994: 265) bahwa untuk kegiatan praktek mata kuliah yang benar-benar baru hingga saat ini peralatannya belum siap. Demikian pula untuk peralatan kerja baru seperti *Computer Numerically Controlled (CNC)* juga belum siap diadaptasi baik oleh pengajar maupun peserta didiknya.

Daya adaptasi pendidikan kita relatif rendah antara lain disebabkan oleh birokrasi dan dinamika perkembangan perekonomian kita masih terbelenggu oleh aturan-aturan praktis seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Birokrasi pendidikan dewasa ini masih terbelenggu oleh sentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah. Juklak dan Juknis selanjutnya berdampak bagi terjadinya kolusi dan korupsi. Hal ini pula yang menyebabkan birokrasi menjadi tidak efisien (biaya tinggi)

dan tidak efektif. Rambu-rambu Juklak dan Juknis cenderung diinterpretasi secara sempit. Akibatnya, keberanian untuk beradaptasi dengan variasi lingkungan lokal menjadi sangat terbatas. Kecenderungan ini diperparah pula oleh sikap untuk menyelamatkan jabatan sehingga melahirkan birokrasi dalam makna patologis yaitu birokrat yang hanya mau dan mampu bertindak dengan hanya berpegang pada perintah atasan atau aturan yang kaku. Birokrat yang demikian menjadi tidak adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Pengelola pendidikan hendaknya mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap pesatnya kemajuan Ipteks di dunia kerja karena apabila pendidikan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka ia akan tergilas oleh jamannya. Untuk mengantisipasi hal itu, IKIP Yogyakarta akan mengembangkan diri menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Jika kita mencintai perubahan, maka kita harus responsif untuk beradaptasi dengan perubahan. Kalau kita lengah, maka dampaknya kita tidak akan dibutuhkan jamannya lagi. Sebagai contoh: kalau tempo dulu fakultas kedokteran dan hukum menjadi fakultas idaman, maka sekarang ini idaman itu sudah berpindah ke fakultas teknik dan fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Era pasar bebas memiliki tiga poros utama yaitu Ipteks, bisnis, dan manajemen. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus beradaptasi dengan tiga poros itu antara lain dengan mengembangkan lebih banyak pendidikan eksakta berbanding noneksakta dengan komposisi 3 : 2. Sementara itu, dewasa ini menurut Taufik (1996:13) bahwa komposisi mahasiswa esakta dengan nonesakta adalah 27 : 63, meningkatkan kemitraan dengan swasta untuk mendanai penelitian dan pengembangan, meningkatkan penelitian, mengembangkan pendidikan profesional ketimbang akademik, melaksanakan akreditasi bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan, dan menggalakkan pendidikan kewiraswastaan.

4. Partisipasi

Tabel berikut ini menunjukkan rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Jika Indonesia kita bandingkan dengan Thailand dan Filipina atau Korea Selatan dihubungkan dengan jumlah penduduknya, maka Indonesia harus meningkatkan angka partisipasi tersebut.

TABEL
ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN TINGGI

NEGARA	PARTISIPASI (%)
Australia	39
USA	76
Kanada	99
Jepang	66
Indonesia	10
Filipina	28
Thailand	16
Malaysia	7
Korea Selatan	40
Hongkong	18

(Unesco, 1995)

Rendahnya partisipasi pendidikan tinggi disebabkan rendahnya kualitas SDM kita untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan lemahnya daya bayar masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Rendahnya kualitas SDM karena anggaran belanja pendidikan kita terendah di negara Asean yaitu 7% dari RAPBN. Sementara itu, negara-negara Asean lainnya rata-rata 12%. Biaya pendidikan yang rendah mustahil menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Lemahnya daya bayar masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan tinggi disebabkan murahnya tenaga kerja, sempitnya peluang untuk berusaha, kurangnya modal untuk berusaha, rendahnya keterampilan kerja untuk berusaha.

Antisipasi dunia pendidikan terhadap tenaga Ipteks yang berkualitas juga terlambat. Asumsinya semakin tinggi angka partisipasi, semakin tinggi pemimpin bangsa yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan semakin kompetitif lulusan yang mampu bersaing di pasar bebas. Rendahnya kemampuan bisnis seperti yang dikeluhkan Menaker karena pendidikan kita belum mampu mengantisipasi tumbuhnya *multinational corporation* menyongsong pasar bebas. Seperti yang telah dinyatakan Menaker (1995:2) bahwa meningkatnya tenaga penganggur sarjana kurang lebih 60.000 orang per tahun dan ironisnya Indonesia membayar tenaga luar negeri untuk membantu dunia bisnis sekitar US\$ 3 milyar setahun. Antisipasinya, dunia pendidikan hendaknya tidak mengabaikan pentingnya pendidikan dan pelatihan wiraswasta yang dikelola secara profesional. Di samping itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan deregulasi agar pendirian universitas, akademi, dan politeknik menjadi mudah. Pendekatannya haruslah semi komersil, artinya investasi pendidikan harus mampu dikembalikan. Dewasa ini, kurang lebih 60.000 mahasiswa Indonesia belajar

di luar negeri dengan menghabiskan devisa kurang lebih US\$ 1,5 milyar per tahun.

Partisipasi masyarakat untuk membantu pembiayaan lembaga pendidikan diramalkan akan meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kelas menengah. Masyarakat semakin kritis dan menuntut kualitas yang tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat akan minta pertanggungjawaban lembaga pendidikan terutama terhadap kualitas lulusan yang dihasilkannya (akuntabilitas). Dunia pendidikan harus mampu mengantisipasi hal ini dengan meningkatkan kualitas lulusannya sesuai standar yang diinginkan pelanggan.

5. Negosiasi

Rendahnya negosiasi di bidang pendidikan ditunjukkan oleh kurang meyakinkannya pengelola pendidikan mengajak pengusaha dan aparat pemerintah terkait untuk bermitra secara efektif dan efisien. Dunia pendidikan dihadapkan pada peluang sekaligus tantangan untuk menciptakan lulusan yang terampil dalam bernegosiasi di pasar bebas nanti. Hanya bangsa yang unggul bernegosiasi (*lobby* perdagangan) yang menang dalam kompetisi di pasar bebas. Modal utama agar negosiasi dapat berhasil dengan baik ialah peserta didik harus dibekali keterampilan dalam berkomunikasi baik tulis maupun lisan. Penyebab rendahnya kemampuan bernegosiasi antara lain karena rendahnya keterampilan berkomunikasi secara efektif. Antisipasinya, peserta didik hendaknya dibekali teknik-teknik berkomunikasi serta diajarkan teori negosiasi sekaligus dengan prakteknya.

6. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis dan lisan serta mampu pula pada memahami pendapat orang lain baik secara tertulis maupun lisan. Komunikasi di dunia pendidikan cenderung rendah, seperti yang dinyatakan Damrosch (1995:186) bahwa para ilmuwan telah tercabut dari akar budaya komunikasi tempat mereka hidup. Perkembangan Inpteks menyebabkan manusia memuja-muja fakultas esakta (fakultas teknik dan MIPA). Mereka seolah-olah tidak memerlukan fakultas nonesakta sehingga timbullah dua kubu ilmuwan yang saling tidak mau berkomunikasi. Mereka mengembangkan Iptek bukan Ipteks. Mereka berkomunikasi dengan bahasanya sendiri, tidak peduli apakah bahasanya dapat dipahami mahasiswa atau masyarakat luas. Semakin asing bahasa dan terminologi yang dipakainya, semakin ilmiah dan bangga dirinya, meskipun Al Qur'an (31:18, 57:23, dan

38:75) telah mengingatkan kepada manusia bahwa **sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya**. Sehubungan dengan hal ini Schweitzer (Tilaar, 1996:22) menyatakan bahwa sebenarnya di antara para ahli mempunyai keinginan untuk berkomunikasi tetapi karena kesombongannya menyebabkan komunikasi terputus. Oleh karena itu, mitra bestari dalam penulisan ilmiah untuk jurnal dan seminar-seminar proposal penelitian yang telah lama dilakukan IKIP Yogyakarta secara konsisten dan bertanggungjawab adalah salah satu sarana untuk mengantisipasi "kecongkakan ilmiah" tersebut, sehingga pendidikan esakta dan nonesakta menjadi dua kubu yang saling melengkapi dan memang dalam kenyataannya sama-sama dibutuhkan bagi pembangunan nasional.

Budaya baca dan komunikasi tulis karya ilmiah bangsa kita masih rendah. Suroso dan Kurniawan (1996:37 dan 42) menyatakan bahwa dari 200 mahasiswa yang melakukan kegiatan membaca dengan serius selama empat jam sehari baru mencapai 15% dan berdasarkan pengamatannya ternyata publikasi karya ilmiah yang ditulis dosen masih terbatas baik jumlah, mutu, media, maupun frekuensi penerbitannya. Telah dinyatakan Koswara (1994:1) bahwa jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian masih sangat rendah yakni baru sekitar 800 orang dari kurang lebih 80.000 dosen negeri. Publikasi karya ilmiah Indonesia di jurnal internasional untuk semua bidang ilmu pada tahun 1996 hanya 52 buah. Kalah dengan Malaysia yaitu 162 buah, Thailand 206 buah, Singapura 314 buah, dan Korea Selatan 490 buah. Sebagai contoh: jumlah judul penelitian para dosen yang dikomunikasikan lewat buku Abstrak Hasil Penelitian IKIP Yogyakarta untuk tahun 1993 sebanyak 200 judul, 1994 sebanyak 239 judul, dan tahun 1995 terjadi penurunan sehingga jumlahnya hanya 192 judul dari 835 dosen.

Rendahnya budaya tulis karya ilmiah ini disebabkan menulis dan meneliti di alam kehidupan yang mengarah ke serba materialistis ini tidak menjanjikan imbalan materi yang memadai. Selain itu, kompetisi yang sangat ketat untuk mendapatkan dana penelitian yang sangat terbatas semakin menutup peluang untuk menulis dan meneliti. Untuk mengatasi komunikasi tulis ilmiah di kalangan dosen, Suroso dan Kurniawan (1996) menyarankan agar: membiasakan menulis dalam setiap kesempatan, menumbuhkan motivasi menulis sebagai suatu kebutuhan bukan untuk angka kredit maupun duit, mengirimkan abstrak makalah, menulis artikel di media massa, menulis **hand-out** untuk memberi kuliah, dan menulis gagasan, refleksi, dan temuan untuk dikirim ke media massa.

Dalam rangka menyongsong pasar bebas, maka kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulis dari para lulusan pendidikan kita harus sudah diantisipasi di dalam program kurikulumnya. Hal ini bermakna bahwa bukan saja penguasaan menulis dan mengucapkan bahasa-bahasa seperti Inggris, Cina, dan Jepang dengan baik; melainkan juga mampu

mendengarkan bahasa-bahasa itu dengan baik pula. Demikian pula bahasa komputer (digital) merupakan bekal yang perlu disiapkan oleh lembaga pendidikan. Antipasinya perlu meningkatkan kemampuan berbahasa melalui kursus-kursus, perlu adanya dialog akademis di kalangan ilmuan dan menggalakkan mitra bestari dalam penulisan ilmiah.

7. Inovasi

Berbagai inovasi telah dilakukan di bidang pendidikan seperti pergantian kurikulum, kebijakan *link and mach*, pendidikan sistem ganda, penataran kewiraswastaan bagi kepala sekolah menengah kejuruan, study banding ke luar negeri, menambah gedung; tetapi kualitas kreativitas dan kemandirian lulusan tetap saja masih rendah. Hal ini sering dikeluhkan oleh pihak pengguna melalui media massa.

Rendahnya inovasi pengelola pendidikan dikarenakan administrasi pendidikan dijalankan terutama melalui surat-surat keputusan dan instruksi-instruksi dari pusat tanpa mempertimbangkan apakah aparat dan sekolah di daerah telah siap melaksanakannya. Para pengelola sekolah menjadi terbiasa untuk menunggu instruksi dari atas dan hanya bekerja kalau ada instruksi.

Inovasi pendidikan tampak dari kreativitas untuk menciptakan lulusan yang kreatif dan inovatif sehingga lulusan dapat menciptakan sesuatu yang selalu lebih baik dari sebelumnya. Perbedaan berpikir hendaknya dapat diterima oleh kalangan dunia pendidikan untuk diambil hikmahnya dalam menemukan kebenaran. Kemampuan inovasi dan kreasi harus didukung oleh tersedianya sarana informasi dan Ipteks yang lengkap serta sumber daya pendidikan yang memadai. Antipasinya, memberikan peluang kepada pengelola pendidikan untuk turut serta dalam pembuatan perencanaan pendidikan serta perlu adanya dukungan sumber daya pendidikan.

8. Jati diri

Pasar bebas yang semakin massif dan ekstensif mengakibatkan batas-batas Ipoleksosbud menjadi samar dan hubungan antar bangsa menjadi transparan. Pasar bebas dewasa ini menyebabkan pola hidup di belahan negara lain dilihat, ditiru, dan dibudayakan. Masuknya penyakit AID, kumpul kebo, kawin kontrak, ekstasi, panti pijat, karaoke, *disco, night club, hot dog, donat, pizza, Kectucky Fruied Chicken, California Fruied Chicken*, pola hidup individualistis, egois, materialistis, konsumerisme, hedonisme merupakan akibat gejala negatif dari globalisasi. Tingginya

penyimpangan tersebut termasuk juga seperti monopoli, oligopoli, penyakit birokrasi, korupsi, kolusi, prostitusi, "kesalahan prosedur", menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, kesemuanya ini dapat merongrong identitas bangsa.

Pasar bebas mempunyai implikasi luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari perspektif kebangsaan, pasar bebas menumbuhkan kesadaran bahwa kita menjadi warga masyarakat global. Di sisi lain, makin tumbuh dorongan untuk lebih melestarikan dan memperkuat **identitas bangsa**. Kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan tetapi bersifat saling melengkapi (komplementer).

Antipasinya, dunia pendidikan harus berfungsi sebagai transformasi budaya, pelestari budaya, dan terapi budaya. Sebagai pelestari budaya, maka tugas pendidikan adalah untuk melestarikan budaya bangsa agar bangsanya berjati diri sehingga tidak diarahkan oleh arus pasar bebas melainkan justru mengarahkan arus tersebut. Di samping itu, suasana pening- katan iman dan taqwa melalu agama perlu semakin digalakkan.

Kesimpulan

Masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan menyongsong pasar bebas nanti di antaranya adalah: kompetisi, kooperasi, adaptasi, partisipasi, negosiasi, komunikasi, inovasi, dan jati diri. Masalah-masalah ini di antaranya disebabkan: sentralisasi birokrasi, meremehkan kualitas, monopoli, oligopoli, korupsi, pungli, mengejar target kuantitas yang formalitas, belum bisa bekerja secara tim, belum ada peraturan perundang-undangan tentang kerjasama pengusaha dengan pengelola sekolah, belenggu aturan-aturan praktis, rendahnya kualitas SDM, lemahnya daya bayar masyarakat, rendahnya keterampilan berkomunikasi, tertutupnya budaya dialogis ilmiah, terbiasa menunggu perintah dari atas, dan dampak negatif globalisasi.

Alternatif pemecahan masalahnya antara lain adalah: perlu adanya undang-undang anti monopoli, adanya budaya kualitas, menciptakan pengelola pendidikan dan lulusan-lulusan yang memiliki terampilan berkooperasi, mengembangkan lebih banyak pendidikan esakta, meningkatkan kemitraan dengan swasta, meningkatkan penelitian, mengembangkan pendidikan profesional, akreditasi bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan, menggalakkan pendidikan kewiraswastaan, deregulasi pendidikan, membekali teori-teori dan praktek negosiasi, mengikuti kursus bahasa, membudayakan dialog ilmiah dan mitra bestari melibatkan pengelola pendidikan dalam perencanaan pendidikan, perlu adanya dukungan sumber daya pendidikan, melestarikan budaya bangsa, dan memperkuat iman dan taqwa melalui agama.

Daftar Pustaka

Al Qur'an

Anonim, 1996a. **The World Competitive Yearbook.**

Anonim. 1996b. **Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996 - 2005.** Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Damrosch, D. 1995. **We Schoolars. Changing the Culture of the University.** Cambridge. Massachusetts: Harvard University Press.

Djarmiko, I.W. 1996. Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi dalam **Jurnal Kependidikan Majalah Ilmiah Penelitian Pendidikan** No. 1 Tahun XXVI, 1996.

Djoemadi dan Rahdiyanto, D. 1994. Identifikasi Kesulitan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK IKIP Yogyakarta terhadap Materi Kuliah Praktek Kerja Mesin CNC dalam **Abstrak Hasil Penelitian IKIP Yogyakarta 1995.** Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.

Koswara, J. Minat Dosen untuk Meneliti sangat Rendah dalam **Republika**, 17 November 1994.

Koentjaraningrat. 1995. **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.** Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mutaqin, dkk. 1995. Kesiapan Dunia Industri terhadap Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam **Abstrak Hasil Penelitian IKIP Yogyakarta 1995.** Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.

Ngadiyono, Y. 1994. Identifikasi Kesulitan Siswa dalam Pelaksanaan Praktek Kerja dengan Mesin CNC di STM se DIY dalam **Abstrak Hasil Penelitian IKIP Yogyakarta 1995.** Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta

Sofyan, H. dkk. 1995. Kesiapan Sekolah dalam Rangka Melaksanakan Program Keterampilan pada SLTP di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam **Abstrak Hasil Penelitian IKIP Yogyakarta 1995.** Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.

Sunaryo, dkk. 1996. Tanggapan Dunia Usaha terhadap Program **Link and Match** dalam **Jurnal Kependidikan Majalah Ilmiah Penelitian Pendidikan.** Nomor I Tahun XXVI, 1996.

Sunyoto, dkk. 1994. Kesiapan Fasilitas Praktek untuk Mengimplementasikan Kurikulum 1992 Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK IKIP

- Yogyakarta dalam **Abstrak Hasil Penelitian IKIP Yogyakarta 1995**. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Suroso dan Kurniawan, K. 1996. Pemberdayaan Dosen melalui Karya Tulis Ilmiah dalam **Cakrawala Pendidikan Majalah Ilmiah Kependidikan**. No. 2, Th. XV, Juni 1996.
- Suyanto, W. dkk. 1995. Kontribusi Industri terhadap STM dalam Rangka Kebijakan Link & Match dalam **Abstrak Hasil Penelitian IKIP Yogyakarta 1995**. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Taufik, I. 1996. **Peningkatan Daya Saing Alumni Perguruan Tinggi melalui Strategi Penyusunan Kurikulum dan Proses Belajar Mengajar Proaktif**. Makalah Seminar Nasional Mempersiapkan Mutu Pendidikan Tinggi Menuju Kualitas Global.
- Tilaar, H.A.R. 1996. **Pendidikan Tinggi di Indonesia Dewasa ini Menghadapi Tantangan Abad XXI**. Makalah Seminar Nasional Mempersiapkan Mutu Pendidikan Tinggi Menuju Kualitas Global.
- Unesco. 1996. **International Commission on Education for the 21st Century**. Paris Report of Commission.